



KEMENTERIAN HUKUM  
KANTOR WILAYAH  
KALIMANTAN SELATAN

#bangga  
melayani  
bangsa



# BULETIN

## KEMENKUM KALSEL NEWS



MINGGU KE-

1

SEPTEMBER 2025



KOLABORASI BANTUAN  
HUKUM



SINERGI LAYANAN HUKUM  
BAKUL FEST 2025



SHARING KNOWLEDGE  
PENINGKATAN KOMPETENSI

DIVISI  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DAN PEMBINAAN HUKUM

DIVISI  
PELAYANAN HUKUM

BAGIAN  
TATA USAHA DAN UMUM

Terhubung lebih dekat:



kemenkumkalsel



@kemenkumkalsel



kalsel.kemenkum.go.id



## Menteri Hukum Ambil Sumpah WNI Atlet Bola: Mauro Zijlstra Resmi WNI, Siap Bela Timnas di Round 4 Kualifikasi World Cup



Den Haag, 29 Agustus 2025 – Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan dan peningkatan olahraga nasional dengan memberikan kewarganegaraan kepada 5 atlet sepak bola, dua atlet sepak bola pria dan tiga atlet sepak bola wanita melalui mekanisme naturalisasi pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI), Dr. Supratman Andi Agtas yang didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta dan Duta Besar Indonesia Luar Biasa Berkuasa Penuh untuk Belanda, Mayerfas, resmi melakukan pengambilan sumpah dan janji setia pewarganegaraan yang berlangsung di Den Haag, Jumat 29 Agustus 2025.

Dari 5 atlet yang telah mendapatkan persetujuan DPR RI dalam sidang paripurna tanggal 26 Agustus tersebut baru 4 atlet yang diambil sumpah dan janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat atlet tersebut adalah, Mauro Nils Zijlstra, Pauline Jeanette van de Pol, Isabel Corian Kopp, dan Isabelle Nottet kelimanya merupakan warga negara Belanda, yang memiliki darah keturunan Indonesia.

Menteri Hukum Republik Indonesia, Dr. Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menegaskan bahwa naturalisasi bukan sekadar perubahan status kewarganegaraan semata, "Momentum ini bukan hanya sekedar tentang perubahan status kewarganegaraan semata, namun juga tentang harapan dan cita-cita besar dalam rangka membangun kemajuan Indonesia, khususnya di bidang olah raga, ujar Menkum.

Negara membutuhkan para atlet yang memiliki talenta, skill (kemampuan) dan transfer knowledge dari para atlet sehingga dibutuhkan utk melengkapi dan memperkuat Tim Nas melalui turalisasi untuk kepentingan negara atau berjasa pada yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Naturalisasi pewarganegaraan dilakukan melalui mekanisme kepentingan negara atau bagi orang asing yang telah berjasa bagi negara dilakukan melalui mekanisme yang cukup panjang dan ketat, dari mulai pengamatan para pemain dari Tim Teknis Pencari Bakat PSSI, menggali informasi dengan pihak2 terkait, baik pelatih, dan klub untuk memastikan bahwa para pemain layak membela Tim Nas melalui proses naturalisasi.

Pada proses naturalisasi ini Kementerian Hukum juga didukung oleh Tim antar Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Tim Pemeriksa dan Penelitian Pemberian Pewarganegaraan (TP4) yang terdiri dari Kementerian Hukum dalam hal ini Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Organisasi Olahraga yang terkait.

Serta partisipasi semua pihak, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Ditjen Imigrasi) dan PSSI.

Selain itu para atlet juga harus melalui serangkaian tahapan termasuk mengikuti rapat dalam rangka meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Bertambahnya pemain berkualitas dalam skuad Tim Nasional Indonesia diharapkan dapat membuka peluang untuk tampil maksimal dalam kompetisi bergengsi skala internasional.

Beberapa agenda besar yang menjadi target utama di antaranya untuk tim nasional sepak bola Pria dalam rangka mengikuti FIFA World Cup 2026 Asian Qualifiers Round 4, ASEAN U23 Boys' Championship 2025, AFC U23 Asian Cup 2026 Qualifiers, AFC U23 Asian Cup, AFC Asian Cup 2027 Saudi Arabia.

Sementara untuk tim nasional sepak bola Wanita dalam rangka mengikuti ASEAN Women Championship 2025-2029, SEA Games 2025 Thailand, FIFA Women's World Cup 2027 Qualifiers, SEA Games 2027 Malaysia, AFC Women Asian's Cup Qualifiers 2029, SEA Games 2029 Singapore, FIFA Women's World Cup 2031 Qualifiers dan ASEAN Women Championship 2030.

Hal-hal tersebut diatas ini merupakan cita cita besar seluruh bangsa Indonesia demikian pula Presiden Prabowo.

Menteri Hukum juga menambahkan bahwa kehadiran atlet diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk membela Merah Putih.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum menegaskan komitmennya untuk mendukung semua proses naturalisasi untuk kepentingan prestasi olahraga nasional. "Menteri Hukum sudah memberi arahan untuk mendukung dan mempercepat semua proses naturalisasi yang memiliki kepentingan prestasi nasional dan kebanggaan bangsa, tentu dengan ketentuan peraturan peundang-undangan di bidang kewarganegaraan" ujarnya

Pemerintah juga menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta, dalam membangun ekosistem olahraga yang sehat dan kompetitif.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, turut menyambut baik langkah pemerintah dalam memberikan kewarganegaraan melalui mekanisme naturalisasi kepada para atlet diaspora. Menurutnya, kebijakan ini mencerminkan bahwa regulasi di bidang kewarganegaraan benar-benar dijalankan untuk kepentingan strategis bangsa, khususnya dalam meningkatkan prestasi olahraga nasional.

"Naturalisasi bukan semata-mata soal status hukum, tetapi juga sebuah strategi kebangsaan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Kehadiran atlet-atlet yang memiliki darah Indonesia di Tim Nasional adalah bukti nyata bahwa hukum hadir sebagai instrumen untuk mendukung kejayaan bangsa," tegas Alex.



## Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Sharing Knowledge: Tingkatkan Kompetensi Dalam Berkomunikasi Pegawai



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Sharing Knowledge dengan tema Impactful Communication dan Public Speaking, Senin (01/09). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari internal pegawai Kemenkum Kalsel yang telah mengikuti Diklat untuk berbagi ilmu, baik Diklat Impactful Communication dan Public Speaking salah satunya M. Ari Sya'bani yang berhasil meraih peringkat pertama dalam Pelatihan Public Speaking yang diselenggarakan Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah sebelumnya.

Acara dibuka dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, yang menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai wujud nyata Kanwil Kemenkum Kalsel sebagai learning organization atau organisasi pembelajaran.

“Inti dari kegiatan ini adalah berbagi. Bukan hanya materi dari Diklat, tapi juga pengalaman sehari-hari dalam pekerjaan. Dengan berbagi, kita bisa saling belajar untuk meningkatkan kompetensi, baik dalam pengembangan diri maupun penguatan organisasi,” ujar Alex.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Bagian TU dan Umum, Rustam Sakka didampingi Ketua Tim Kerja SDM, Eko Herdianto. Peserta kegiatan berasal dari pegawai Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, termasuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), serta mahasiswa/i magang yang sedang menjalani praktik kerja.

Dalam sesi materi, narasumber menyampaikan kiat-kiat berkomunikasi efektif, teknik berbicara di depan publik, hingga strategi menghadapi audiens dengan percaya diri. Diskusi berjalan interaktif dengan berbagai pertanyaan dan pengalaman yang dibagikan, menambah nilai praktis dalam penerapan komunikasi di lingkungan kerja. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pegawai Kemenkum Kalsel dalam berkomunikasi, baik dalam tugas kedinasan maupun saat berinteraksi dengan masyarakat, sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas layanan publik.





## Perkuat Sinergi Kehumasan, Kanwil Kemenkum Kalsel Hadiri Rapat Strategi Komunikasi Kementerian Hukum



Banjarmasin, Humas\_Info – Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia (Biro Hukerma Setjen Kemenkum RI) menyelenggarakan Rapat Kehumasan, Senin (1/9/25), secara daring melalui aplikasi Zoom. Rapat ini diikuti oleh perwakilan Pranata Hubungan Masyarakat dan pegawai yang membidangi tugas kehumasan dari seluruh satuan kerja Kementerian Hukum.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut serta dalam kegiatan ini dengan menugaskan dua pejabat pranata humas, yaitu Eko Sulistiyono, Pranata Humas Muda dan Jo'el Simanjuntak, Pranata Humas Pertama. Kehadiran keduanya menjadi bagian representasi Kanwil Kemenkum Kalsel dalam memperkuat koordinasi komunikasi publik, sekaligus menyelaraskan strategi kehumasan di wilayah dengan agenda nasional.

Kegiatan ini menjadi forum penting dalam menyinergikan langkah komunikasi publik Kementerian Hukum dengan agenda prioritas pemerintah. Melalui rapat tersebut, setiap satuan kerja diharapkan menambahkan kata kunci “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” serta tagar #SetahunBerdampak pada setiap konten untuk mendukung komunikasi positif melalui media sosial. Selain itu, konten yang diproduksi diharapkan tidak hanya menampilkan angka capaian, tetapi juga kisah nyata penerima manfaat program pemerintah.

Beberapa program unggulan Kementerian Hukum yang menjadi fokus publikasi meliputi layanan hukum yang antara lain pendaftaran kekayaan intelektual, layanan administrasi hukum umum, bantuan hukum gratis, serta layanan konsultasi hukum. Konten yang sudah diproduksi wajib dilaporkan secara berkala setiap minggu melalui tautan yang telah disediakan, guna memastikan konsistensi dan keterpaduan komunikasi publik Kementerian Hukum. Selain itu, satuan kerja juga diimbau melakukan cross-posting dan kolaborasi konten untuk memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan interaksi publik.

Melalui agenda setting ini, Kementerian Hukum menegaskan komitmen untuk menyampaikan informasi secara tepat, meningkatkan literasi hukum, serta membangun reputasi positif di mata masyarakat dan pemangku kepentingan.





## Lindungi Karya dan Produk Lokal, Kemenkum Kalsel bersama RRI Banjarmasin Bahas Urgensi Pendaftaran Kekayaan Intelektual



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan bersama RRI Program 1 Banjarmasin menyelenggarakan Dialog Interaktif Banjar Realita yang mengangkat tema “Pentingnya Pendaftaran Kekayaan Intelektual”, pada Senin (01/09/2025) bertempat di Studio Pro 1 RRI Banjarmasin.

Kegiatan ini menghadirkan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah sebagai narasumber. Dialog dibuka dengan sambutan dari pihak RRI Banjarmasin yang menekankan pentingnya perlindungan KI bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah.

Dalam pemaparan, Meidy menjelaskan pengertian Kekayaan Intelektual sebagai hak yang diberikan negara atas hasil ciptaan maupun penemuan yang bermanfaat bagi manusia. Lebih lanjut, dijabarkan pula jenis-jenis KI, di antaranya Hak Cipta yang melindungi karya seni, sastra, hingga program komputer, serta Merek yang menjadi identitas produk atau jasa. Pendengar juga mendapat penjelasan terkait proses pendaftaran KI yang dapat dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) maupun Konsultan HKI terdaftar, dengan tarif pendaftaran yang kini dipatok Rp. 200.000 untuk semua kategori sesuai kebijakan tahun tematik Hak Cipta dan Desain Industri 2025.

Selain itu, dialog juga menyoroti peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam mengelola hak ekonomi pencipta serta distribusi royalti dari pemanfaatan karya, misalnya di kafe atau karaoke.

Antusiasme peserta terlihat dalam sesi tanya jawab yang membahas lebih lanjut manfaat pendaftaran KI, mekanisme perlindungan Hak Cipta dan Merek, serta jangka waktu perlindungannya. Hak Cipta dilindungi seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelahnya, sedangkan Merek berlaku 10 tahun dan dapat diperpanjang.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin menyadari pentingnya mendaftarkan karya maupun merek untuk memperoleh perlindungan hukum serta manfaat ekonomi dari Kekayaan Intelektual.





## Kanwil Kemenkum Kalsel dan Kanwil HAM Kalsel Tandatangani Perjanjian Penggunaan BMN



Banjarmasin, Humas\_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, Karyadi, menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Bersama dan Surat Perjanjian Penggunaan BMN Sementara, Senin (01/09/2025).

Penandatanganan perjanjian yang dilaksanakan di Balai Pertemuan BerAkhlak Kanwil Kemenkum Kalsel ini merupakan tindak lanjut atas ketentuan perundang-undangan serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum mengenai pelaksanaan penggunaan BMN pada masa transisi kementerian.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan wujud sinergi dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Kanwil HAM Kalsel.

“Pemanfaatan BMN secara bersama dan sementara ini tidak mengubah status kepemilikan, tetapi bertujuan untuk optimalisasi aset negara agar lebih produktif dan bermanfaat,” ujarnya.

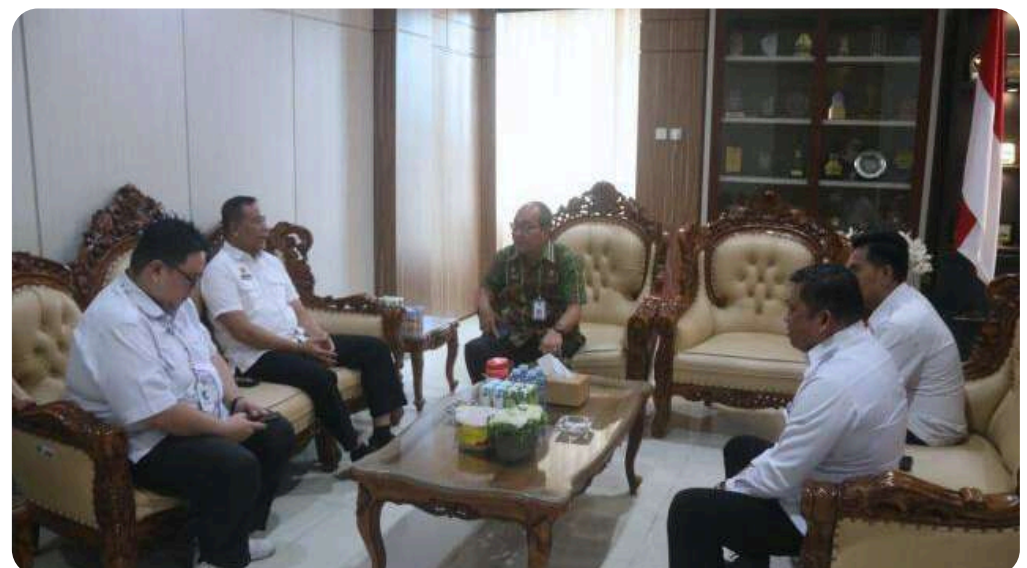
Senada dengan itu, Kepala Kanwil HAM Kalsel, Karyadi, mengapresiasi langkah ini sebagai bentuk dukungan nyata dalam memperkuat penyelenggaraan tugas di lingkungan Kementerian HAM.



“Kami berkomitmen untuk menjaga, merawat, dan menggunakan aset negara sesuai peruntukan, sehingga dapat mendukung pelayanan publik secara optimal,” ungkapnya.

Perjanjian penggunaan BMN bersama dan sementara ini berlaku hingga 31 Desember 2025, dengan ketentuan biaya pemeliharaan dibebankan kepada pihak penerima penggunaan. Kedua pihak juga sepakat untuk mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap perjanjian.

Melalui sinergi ini, diharapkan penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian di daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta mendukung tata kelola aset negara yang transparan dan akuntabel.





## Kolaborasi Bantuan Hukum: Kemenkum Kalsel Tandatangani Addendum Kontrak dengan LBH



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan penandatanganan kontrak addendum pelaksanaan bantuan hukum bertempat di Balai Pertemuan Garuda (BPG), Senin (01/09/2025).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Anton Edward Wardhana, serta para Ketua/Direktur dari masing-masing Lembaga Pemberi Bantuan Hukum (LBH) atau yang mewakili.

Tercatat sebanyak tujuh LBH yang menandatangani kontrak addendum, yakni:

1. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga;
2. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura;
4. Posbakumadin Banjarbaru;
5. Posbakumadin Tanah Laut;
6. Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan;
7. Lembaga Bantuan Hukum Sipakatuo.

Dalam penyampaian, Kadiv P3H, Anton Edward Wardhana, menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan layanan negara untuk masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu, baik dalam pendampingan litigasi maupun non-litigasi. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara LBH dan pemerintah, sejalan dengan upaya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di berbagai daerah.

Keberadaan pemerintah di tengah masyarakat sangat penting, dan melalui kerja sama dengan LBH kita bisa memastikan bahwa akses keadilan dapat dirasakan hingga lapisan masyarakat terbawah,” ujarnya.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan addendum ini merupakan bagian dari program negara yang harus dimaksimalkan manfaatnya.

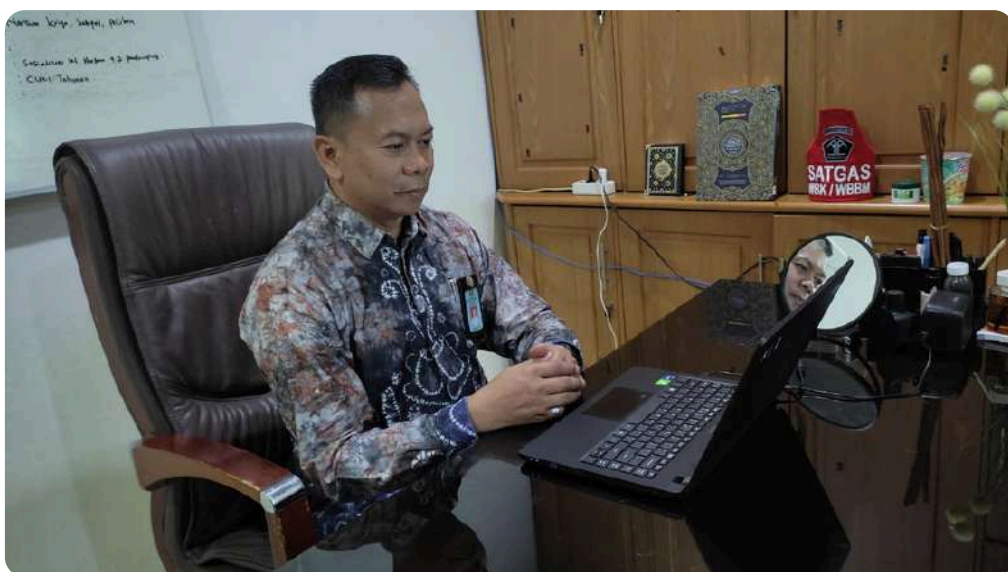
“Bantuan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, adalah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi hak-hak masyarakat pencari keadilan. Harapan saya, kegiatan ini tidak hanya menjadi formalitas, melainkan benar-benar memberi manfaat dalam pembangunan hukum di Kalimantan Selatan,” ungkap Alex.

Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan dokumen addendum oleh masing-masing LBH bersama pihak Kanwil Kemenkum Kalsel, menandai komitmen bersama untuk memperkuat akses keadilan dan layanan bantuan hukum yang lebih merata di Kalimantan Selatan.





## Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Ikuti Webinar OKE KI #29 tentang Advokasi Pelindungan Hukum Desain Industri



Banjarmasin, KI\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mengikuti kegiatan Webinar OKE KI #29 dengan tema “Advokasi Pelindungan Hukum Desain Industri”, Senin (01/09/2025).

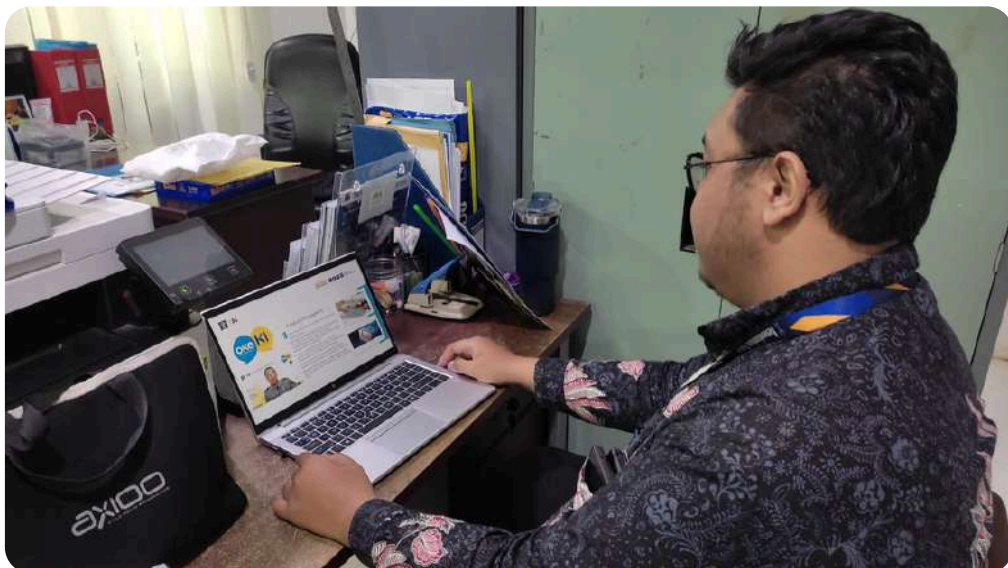
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini menghadirkan narasumber Krissantyo Adinda selaku Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya. Webinar bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai prosedur, persyaratan, serta manfaat pelindungan hukum desain industri.

Dalam pemaparannya, narasumber menekankan pentingnya pendaftaran desain industri sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap produk kreatif sekaligus aset strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Peserta juga memperoleh penjelasan terkait prosedur pendaftaran, dokumen yang diperlukan, serta tips penyusunan deskripsi desain yang memenuhi persyaratan agar memperoleh hak pelindungan secara optimal.

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, Riswandi, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi jajaran pelayanan kekayaan intelektual di daerah.

“Pemahaman yang lebih mendalam mengenai prosedur dan manfaat pelindungan hukum desain industri akan membantu kami dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Kami berharap semakin banyak pelaku usaha dan kreator yang sadar pentingnya mendaftarkan desain industrinya sebagai bentuk perlindungan hukum sekaligus upaya mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi di Kalimantan Selatan,” ungkapnya.

Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan berkomitmen terus memperkuat layanan kekayaan intelektual di daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelindungan hukum atas karya dan inovasi.





## Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Pembahasan Layanan Aplikasi SIMPALNOT



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menyelenggarakan rapat pembahasan layanan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Pelayanan Notaris (SIMPALNOT) pada Selasa, (2/9/25) bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.

Rapat ini dihadiri Perwakilan Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Kehormatan Notaris (MKN), serta Majelis Pengawas Daerah (MPD) se-Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.02-86 Tahun 2025 tentang Aplikasi SIMPALNOT yang ditetapkan pada 28 Agustus 2025.

SIMPALNOT merupakan aplikasi terpadu yang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi dalam layanan kenotariatan. Aplikasi ini mencakup tiga fitur utama, yaitu manajemen permohonan konduite, permohonan cuti, dan pelaporan bulanan notaris. Melalui sistem ini, proses layanan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual akan lebih cepat, akurat, dan dapat dipantau secara real-time.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah, yang memimpin rapat, menyampaikan bahwa aplikasi ini akan menjadi sarana utama dalam pengelolaan pelayanan kenotariatan.

“SIMPALNOT diharapkan dapat menyederhanakan alur kerja, mengurangi risiko kesalahan, dan mempermudah monitoring kinerja Notaris maupun Majelis Pengawas Notaris,” ujarnya.



Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari, menekankan pentingnya peran aktif para Notaris dalam memanfaatkan aplikasi ini. “Dengan adanya SIMPALNOT, Notaris dapat lebih mudah menyampaikan laporan maupun permohonan secara elektronik. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tahapan layanan kenotariatan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan akan segera melakukan sosialisasi kepada para Notaris dan Majelis Pengawas Notaris di wilayah kerja masing-masing terkait penggunaan aplikasi ini, sesuai arahan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dengan implementasi SIMPALNOT, pelayanan kenotariatan diharapkan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sejalan dengan komitmen Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk terus menghadirkan layanan berbasis digital yang modern dan terpercaya.





## Kolaborasi Batola & Kemenkum Kalsel: Perda Lama Disisir, Aturan Baru Disiapkan



Marabahan, P3H\_Info - Suasana Aula Bahalap pada Selasa pagi (02/09) agak berbeda. Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Kuala (Batola) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengadakan kegiatan Evaluasi Peraturan Daerah (Perda).

Acara dibuka langsung oleh Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesra, Ibadurrahman, yang menegaskan kalau langkah ini jadi start penting.

“Selama ini Batola belum pernah melakukan evaluasi Perda secara sistematis dan komprehensif. Kita harap kegiatan ini jadi batu loncatan. Karena akan Ada 28 (dua puluh delapan) Perda yang bakal dievaluasi mandiri oleh tiap SKPD,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi Perda demi naiknya indeks kualitas kebijakan dan indeks reformasi hukum di Batola.

### Sorotan Perda Layak Anak & Ketertiban Umum

Dari pihak Kemenkum, Bahjatul Mardhiah, Perancang Peraturan Perundang-Undangan, menilai Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak sudah waktunya di-update. Menurutnya, aturan tersebut tidak lagi relevan dengan dinamika masyarakat terkini.

Sementara itu, Ariyanto, Analis Hukum Kanwil Kemenkumham Kalsel, mengupas soal Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. “Fakta di lapangan masih banyak pelanggaran: PKL, parkir liar, pengemis, sampai reklame ilegal. Supaya rasa aman di masyarakat terjamin, perlu ada regulasi turunan seperti SOP dan Peraturan Bupati,” jelasnya.



Hal ini langsung diamini Lisa Hadiyani dari Satpol PP Batola. Ia cerita kalau di lapangan mereka sering kebingungan. “Contohnya penertiban reklame ilegal. Walau sudah koordinasi dengan DPMPTSP, aturan teknisnya belum ada. Jadi kita masih lebih banyak mengedepankan pendekatan persuasif ke masyarakat,” ungkapnya.

### Kompak Hadirkan 23 SKPD

Giat ini makin solid dengan hadirnya 23 SKPD Batola, di antaranya Inspektur Inspektorat, Kepala DP2KB dan P3A, hingga Dinas DPMPTSP. Semua hadir demi satu tujuan: membuat Perda yang relevan, aplikatif, dan berpihak ke masyarakat.

### Tindak Lanjut: Evaluasi Mandiri

Agenda ini tidak berhenti di forum diskusi aja. Nantinya tiap SKPD bakal lanjut dengan evaluasi mandiri untuk kepentingan usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

“Biar kita punya perencanaan yang lebih matang dalam pembentukan produk hukum daerah,” tutup Ibadurrahman. Dengan semangat kolaboratif ini, Batola menunjukkan kalau urusan regulasi bisa tetap serius tapi tidak kaku. Evaluasi Perda bukan sekadar rutinitas, tapi bagian dari membuat kebijakan yang on point dengan kebutuhan masyarakat kekinian.



## Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Penandatanganan Kontrak dan Rapat Persiapan Pembangunan Lanjutan Gedung Tahun Anggaran 2025

Banjarbaru, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Penandatanganan Kontrak dan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Pre Construction Meeting/PCM) Pembangunan Lanjutan Gedung Kanwil Kemenkum Kalsel Tahun Anggaran 2025, bertempat di Gedung Baru Kanwil Kemenkum Kalsel, Banjarbaru, pada Selasa (02/09). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, Pejabat Pembuat Komitmen, perwakilan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, tim pengelola kegiatan, pihak penyedia, konsultan, serta pelaksana Kanwil Kemenkum Kalsel.

Kegiatan dibuka oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Eko Herdianto, yang menyampaikan agenda utama berupa penandatanganan kontrak dan pelaksanaan PCM. Dilanjutkan dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, yang menekankan pentingnya konsolidasi sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan.

“Perlu dilakukan pengenalan tugas dan fungsi masing-masing pihak, serta koordinasi intensif antara penyedia, konsultan perencana, dan konsultan pengawas agar pembangunan lanjutan gedung dapat berjalan sesuai target waktu,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah juga menegaskan bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dirinya memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan penuh terhadap jalannya pembangunan.

Rapat PCM membahas secara rinci hal-hal teknis dalam pelaksanaan kontrak, mulai dari struktur organisasi tim, kelengkapan dokumen, jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 120 hari kalender, masa pemeliharaan 180 hari kalender, hingga skema pembayaran prestasi pekerjaan yang dibagi menjadi lima termin.

Selain itu, dibahas pula mengenai jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak, rencana penarikan uang muka sebesar 20%, serta kesepakatan teknis lainnya yang meliputi tata cara pelaksanaan pekerjaan, kebutuhan bahan material, prosedur keselamatan kerja, hingga spesifikasi teknis yang harus dipatuhi.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan kontrak antara PPK Pembangunan Lanjutan Gedung Kanwil Kemenkum Kalsel TA 2025 dengan PT Sanur Jaya Utama selaku pelaksana konstruksi. PT Sanur Jaya Utama juga menyampaikan paparan terkait kesiapan pelaksanaan pekerjaan dalam sesi PCM.

Kepala Kantor Wilayah berharap agar seluruh pihak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, melakukan pengawasan secara berkala, serta belajar dari pengalaman sebelumnya sehingga pembangunan gedung lanjutan ini dapat terlaksana sesuai jadwal, tepat mutu, dan tepat sasaran.





## Kanwil Kemenkum Kalsel Hadir di Bakul Fest 2025, Wujud Sinergi dengan Pemkot Banjarmasin

Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut berpartisipasi dalam Bakul Fest 2025 yang berlangsung di Halaman Balai Kota Banjarmasin. Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara Kanwil Kemenkum Kalsel dengan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam memberikan pelayanan publik yang dekat dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Kanwil Kemenkum Kalsel menghadirkan berbagai layanan publik, mulai dari Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI), hingga Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Sebagai bentuk apresiasi, Kanwil memberikan kesempatan terbatas kepada 10 pendaftar pertama Perseroan Perorangan untuk mendapatkan layanan secara gratis.



Stand pelayanan Kanwil Kemenkum Kalsel akan dibuka selama enam hari, mulai 2 hingga 6 September 2025, dengan jam operasional pukul 15.00 hingga 21.00 WITA. Kehadiran layanan hukum ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem hukum, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat kerja sama antara Kementerian Hukum dan Pemerintah Daerah demi terciptanya masyarakat yang semakin sadar hukum.



Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, hadir langsung bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana untuk meninjau jalannya pelayanan. Ia menegaskan bahwa layanan ini tidak hanya ditujukan bagi pelaku UMKM, tetapi juga terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Partisipasi Kanwil Kemenkum Kalsel dalam Bakul Fest 2025 adalah wujud nyata kehadiran negara melalui sinergi dengan Pemerintah Kota Banjarmasin. Kami ingin memastikan bahwa pelayanan hukum semakin mudah dijangkau dan memberi manfaat luas, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat umum,” ujar Alex.





## Gairahkan Ekonomi Lokal, Kemenkum Kalsel Gandeng UMKM HST Manfaatkan Legalitas Perseroan Perorangan



Senada dengan itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, menjelaskan bahwa pendaftaran Perseroan Perorangan merupakan langkah strategis yang memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya.

“Dengan berbadan hukum Perseroan Perorangan, aset pribadi pemilik terlindungi dari risiko bisnis. Ini adalah bentuk perlindungan nyata dari negara bagi para wirausahawan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa proses pendaftarannya sangat mudah dan dapat dilakukan secara daring, tanpa perlu biaya besar.

Selama sesi pemaparan, tim Kanwil Kemenkum Kalsel menjelaskan secara rinci alur pendaftaran Perseroan Perorangan. Para peserta UMKM tampak sangat antusias dan aktif bertanya, menunjukkan tingginya minat mereka untuk segera mengurus legalitas usaha. Sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah yang kuat untuk memperkuat fondasi ekonomi lokal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.



Barabai, AHU\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) menggelar sosialisasi intensif tentang Perseroan Perorangan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong UMKM agar memiliki kepastian hukum dan kemudahan dalam mengembangkan usahanya di tengah persaingan bisnis yang kian ketat.

Acara yang dilaksanakan pada Rabu, (03/09), bertempat di Dinas Perdagangan Kabupaten HST, dihadiri oleh sejumlah pejabat penting. Tim dari Kanwil Kemenkum Kalsel dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, didampingi Kepala Bidang Pelayanan AHU dan jajaran pelaksana.

Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Syafa'at, menyampaikan apresiasi atas inisiatif ini.

“Kami berharap para pelaku UMKM di sini dapat memanfaatkan kesempatan emas ini untuk memahami pentingnya legalitas usaha. Legalitas bukan hanya sekadar dokumen, tetapi juga kunci untuk membuka akses ke permodalan dan pasar yang lebih luas,” ujarnya.





## Peran Aktif dalam Bakul Fest 2025, Kemenkum Kalsel Raih Penghargaan dan Apresiasi dari Wali Kota Banjarmasin



Banjarmasin, Yankum\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menerima penghargaan dari Wali Kota Banjarmasin sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan Bakul Fest 2025 (Bamara Kuliner Festival). Penghargaan ini diserahkan pada Kick off rangkaian peringatan Hari Jadi ke-499 Kota Banjarmasin, yang berlangsung pada Selasa (02/09) di Kawasan Siring Balai Kota Banjarmasin.

Penghargaan tersebut secara resmi ditandatangani oleh Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, dan diberikan kepada Kementerian Hukum Kanwil Kalsel yang diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana yang mewakili Kepala Kantor Wilayah sebagai pendukung acara dalam menyediakan layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam partisipasinya, Kanwil Kemenkum Kalsel menghadirkan berbagai layanan seperti Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual (KI), serta Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

Layanan ini tidak hanya ditujukan bagi pelaku UMKM, tetapi juga terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat, sebagai bentuk nyata mendekatkan akses hukum kepada publik.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan rasa syukur atas apresiasi yang diberikan Pemerintah Kota Banjarmasin.

"Penghargaan ini adalah wujud sinergi yang baik antara Kanwil Kemenkum Kalsel dengan Pemerintah Kota Banjarmasin. Kami berharap ke depan layanan hukum semakin dikenal, semakin mudah dijangkau, dan benar-benar memberi manfaat luas bagi masyarakat," ungkap Alex.

Penghargaan ini menjadi penegasan atas kontribusi nyata Kanwil Kemenkum Kalsel dalam mendukung pembangunan hukum sekaligus mempererat hubungan kelembagaan dengan Pemerintah Daerah, khususnya dalam momentum perayaan Hari Jadi ke-499 Kota Banjarmasin.





## Bakul Fest 2025: Wagub Kalsel Tinjau dan Beri Apresiasi Stand Layanan Kanwil Kemenkum Kalsel



Banjarmasin, Yankum\_Info – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, melakukan kunjungan ke stand layanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dalam rangkaian kegiatan Bakul Fest 2025 yang digelar di Halaman Balai Kota Banjarmasin, Selasa (2/9).

Kunjungan Wakil Gubernur ini menjadi bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap upaya Kanwil Kemenkum Kalsel dalam menghadirkan pelayanan hukum yang dekat dan bermanfaat bagi masyarakat. Stand layanan tersebut menyediakan berbagai fasilitas, antara lain Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI), serta layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur mengapresiasi langkah Kanwil Kemenkum Kalsel yang aktif hadir di tengah masyarakat melalui momentum Bakul Fest 2025. Menurutnya, kehadiran stand layanan ini dapat memperluas akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan hukum, termasuk pendaftaran perseroan perorangan, perlindungan kekayaan intelektual, hingga akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana yang mewakili Kakanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menegaskan bahwa kehadiran Kemenkum Kalsel dalam Bakul Fest adalah bentuk nyata sinergi antara Kemenkum dengan Pemerintah Daerah.



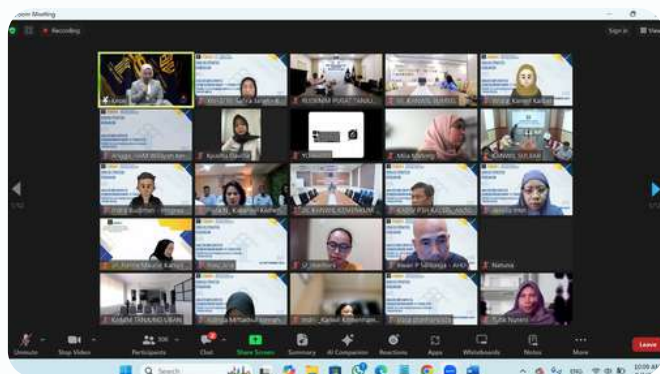
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat, baik pelaku usaha maupun warga umum, dapat dengan mudah mengakses layanan hukum negara secara langsung,” ungkapnya.

Stand layanan Kanwil Kemenkum Kalsel sendiri akan berlangsung selama enam hari, 2–6 September 2025, dengan jam operasional pukul 15.00–21.00 WITA. Kehadiran layanan ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan UMKM, meningkatkan kesadaran hukum, serta memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, teks & foto: Kontributor, ed: Eko/Mahdi)





## Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Diskusi Strategi Kebijakan Terkait Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Anton Edward Wardhana, bersama tim kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) turut serta dalam kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan di Wilayah yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Kepulauan Riau secara daring, Rabu (3/9/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyebarluasan informasi hasil analisis strategi implementasi kebijakan terkait Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Diskusi menghadirkan narasumber dari Tim Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Kanwil Kemenkum Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai Unit Eselon I pemrakarsa kebijakan, serta akademisi dari Universitas Internasional Batam.

Rangkaian acara dipandu oleh Host TVRI Kepulauan Riau sebagai moderator dan turut diikuti jajaran Kanwil Kemenkum seluruh Indonesia.

Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, menyampaikan bahwa partisipasi aktif dalam forum ini sangat penting untuk memperkuat pemahaman serta konsistensi penerapan aturan di daerah.

“Melalui diskusi ini kita dapat mengidentifikasi tantangan, menyelaraskan strategi, dan memastikan penerapan kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan regulasi,” ujarnya. Kegiatan berlangsung interaktif dengan paparan materi, sesi tanya jawab, hingga penutupan yang dilakukan oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kepulauan Riau.



## Kanwil Kemenkum Kalsel dan BRIDA Kalsel Perkuat Sinergi Pendaftaran Indikasi Geografis



Banjarmasin, KI\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) melaksanakan koordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan. Pertemuan yang berlangsung pada Rabu (3/9) di Kantor BRIDA Prov. Kalsel ini membahas pemenuhan data dukung B09 khususnya terkait produk unggulan daerah dan potensi Indikasi Geografis (IG).

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel, Riswandi, bersama tim JFT, JFU, dan Helpdesk KI, menyampaikan pentingnya sinergi dalam penyusunan deskripsi produk unggulan yang akan diajukan pendaftaran IG ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Beberapa produk khas daerah yang didorong untuk mendapatkan perlindungan IG antara lain cempedak/mandai asal Balangan serta kopiah jangang dari Tapin.

Pihak BRIDA Prov. Kalsel menyampaikan bahwa saat ini terdapat sejumlah produk unggulan yang sedang dalam kajian peneliti, khususnya di sektor pertanian, yakni padi, karet, itik, ikan haruan, dan ikan patin. BRIDA juga menyiapkan anggaran untuk pengurusan Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2026, dengan rencana pendaftaran IG bagi beras hitam dan beras buyung. Namun, BRIDA menegaskan perlunya koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah kabupaten/kota agar tidak terjadi tumpang tindih permohonan IG.



BRIDA juga menyiapkan anggaran untuk pengurusan Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2026, dengan rencana pendaftaran IG bagi beras hitam dan beras buyung. Namun, BRIDA menegaskan perlunya koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah kabupaten/kota agar tidak terjadi tumpang tindih permohonan IG.

Selain membahas produk unggulan daerah, pertemuan juga menyinggung mengenai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). BRIDA menyatakan siap untuk mendukung dan memfasilitasi daerah-daerah yang memiliki potensi namun belum memiliki penelitian pendukung, sehingga produk lokal dapat segera didaftarkan.

“Koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mempercepat proses penyusunan dokumen deskripsi dan pengajuan SK pengelola produk unggulan agar dapat segera diajukan ke DJKI. Dengan demikian, di tahun 2026 proses pendaftaran IG dapat berjalan lebih optimal,” ujar Riswandi.

Kegiatan koordinasi ini menjadi bagian dari upaya sinergis antara Kanwil Kemenkum Kalsel dan BRIDA Prov. Kalsel dalam mendukung perlindungan serta pengembangan potensi kekayaan intelektual lokal, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat daerah.





## Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Pemeriksaan Mata, Wujud Peduli Kesehatan Pegawai



Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, meninjau langsung jalannya kegiatan dan menyampaikan apresiasi atas antusiasme pegawai dalam mengikuti pemeriksaan.

“Pemeriksaan kondisi mata ini penting agar pegawai mengetahui sejak dini apakah mengalami minus, plus, atau silinder. Dengan kondisi penglihatan yang lebih baik, tentu akan menunjang kinerja sehari-hari dan mendukung pelayanan publik yang prima,” ujar Anton.

Kegiatan ini mendapat respon positif dari para peserta, yang merasa terbantu karena dapat mengetahui secara detail kondisi mata mereka saat ini. Pemeriksaan semacam ini juga diharapkan dapat dilakukan secara rutin sebagai bagian dari perhatian terhadap kesejahteraan pegawai.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kesehatan pegawai, sehingga semangat kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat senantiasa terjaga.



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyelenggarakan pemeriksaan kondisi mata bagi seluruh pegawai, PPNPN, hingga mahasiswa magang, pada Kamis (04/09) termasuk pegawai dari Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Kalsel.

Pemeriksaan difokuskan pada identifikasi tingkat kesehatan mata peserta, meliputi deteksi gangguan rabun jauh (minus), rabun dekat (plus), maupun astigmatisme (silinder). Dengan pemeriksaan ini, setiap individu dapat mengetahui kondisi mata terkini, sehingga dapat melakukan langkah perawatan yang tepat dan menyesuaikan kebutuhan kacamata bila diperlukan.





## Bakul Fest 2025: Warga Banjarmasin Antusias Konsultasi di Layanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan kembali menghadirkan layanan hukum pada hari kedua pelaksanaan Bakul Fest 2025 yang berlangsung di Halaman Balai Kota Banjarmasin, Rabu (03/09/2025). Kegiatan ini menjadi rangkaian dari peringatan Hari Jadi ke-499 Kota Banjarmasin, sekaligus bentuk komitmen Kanwil dalam memberikan akses informasi dan layanan hukum kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Kanwil Kemenkum Kalsel membuka layanan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU), serta konsultasi bantuan hukum. Masyarakat umum, pelaku usaha, hingga perwakilan SKPD Kota Banjarmasin turut memanfaatkan layanan ini untuk mendapatkan informasi langsung dari petugas terkait berbagai prosedur hukum.

Fokus utama layanan adalah memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi karya dan usaha. Tim Kanwil menjelaskan prosedur pendaftaran merek, desain industri, paten, hingga hak cipta. Selain itu, pengunjung juga diberikan penjelasan mengenai pengelolaan izin usaha serta proses pendaftaran badan hukum yang mendukung keberlanjutan bisnis.

Antusiasme pengunjung pada hari kedua ini cukup tinggi, terutama dalam hal pendaftaran merek dan hak cipta. Melalui konsultasi, masyarakat mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana regulasi hukum dapat menjadi instrumen penting untuk melindungi dan meningkatkan daya saing produk kreatif maupun usaha lokal.

Dengan adanya partisipasi ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari semakin meningkat, serta mendorong lahirnya karya dan usaha yang terlindungi secara legal dan berdaya saing di pasar.





## Kanwil Kemenkum Kalsel Hadir di Hari Ketiga Bakul Fest 2025 dengan Layanan Hukum dan Konsultasi KI

Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan hukum yang dekat dengan masyarakat. Pada Kamis (4/9), Kanwil Kemenkum Kalsel hadir di hari ketiga pelaksanaan Bakul Fest 2025 yang berlangsung di Halaman Balai Kota Banjarmasin dengan membuka layanan hukum dan konsultasi bantuan hukum.

Melalui stan layanan, masyarakat masih dapat melakukan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI), layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), hingga konsultasi langsung terkait perlindungan karya maupun usaha. Antusiasme terlihat dari banyaknya pengunjung yang datang untuk berkonsultasi mengenai prosedur pendaftaran merek, manfaat perlindungan hak cipta, serta pengambilan sertifikat KI yang telah selesai diterbitkan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem sebelumnya menyampaikan bahwa kehadiran layanan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap produk kreatif dan usaha lokal.

“Partisipasi masyarakat pada kegiatan ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum, khususnya di bidang Kekayaan Intelektual. Hal ini menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memberikan nilai tambah bagi karya dan usaha masyarakat,” ungkap Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berharap masyarakat dapat semakin memahami bahwa perlindungan hukum bukan hanya sekadar formalitas, melainkan instrumen strategis dalam menjaga keberlanjutan usaha dan meningkatkan daya saing di tingkat lokal maupun nasional.





## Kemenkum Kalsel Bagawi: Antusiasme Masyarakat Warnai Hari Keempat Bakul Fest 2025, Wali Kota Banjarmasin Kunjungi Layanan Hukum



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan kembali melanjutkan pelayanan hukum dan konsultasi bantuan hukum pada hari keempat gelaran Bakul Fest 2025 yang berlangsung di Halaman Balai Kota Banjarmasin, Kamis (4/9).

Masyarakat terlihat antusias memanfaatkan kesempatan ini, khususnya untuk melakukan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI), layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), serta konsultasi langsung terkait perlindungan karya dan usaha mereka. Bukti "Kemenkum Kalsel Bagawi", beberapa pengunjung banyak menanyakan prosedur pendaftaran merek dan manfaat perlindungan hak cipta bagi produk kreatif.

Selain itu, sejumlah masyarakat juga melakukan pengambilan sertifikat KI yang sudah selesai proses penerbitannya. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya memberikan nilai tambah pada karya maupun usahanya melalui perlindungan hukum.

Wali Kota Banjarmasin turut hadir meninjau stan pelayanan hukum Kanwil Kemenkum Kalsel. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota memberikan apresiasi atas layanan yang dihadirkan serta menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Partisipasi aktif masyarakat pada kegiatan ini sekaligus menjadi bukti komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel "Bagawi" dalam menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses serta meningkatkan pemahaman publik mengenai pentingnya perlindungan hukum sebagai salah satu modal utama dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal.





## Layanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel Tutup Rangkaian Bakul Fest 2025 dengan Antusiasme Masyarakat



Banjarmasin, Yankum\_Info – Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menutup rangkaian partisipasinya pada Bakul Fest 2025 dengan menghadirkan layanan hukum dan konsultasi bantuan hukum di Halaman Balai Kota Banjarmasin, Minggu (7/9). Selama enam hari sejak 2 September 2025, layanan ini memberikan akses langsung kepada masyarakat, pelaku usaha, hingga instansi pemerintah terkait, khususnya dalam bidang pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), serta konsultasi bantuan hukum.

Masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan informasi seputar pendaftaran KI, perlindungan hak cipta, pengelolaan izin usaha, hingga pendaftaran badan hukum. Bahkan, sejumlah pengunjung menerima sertifikat KI yang telah selesai diproses, menandai adanya kepastian hukum terhadap karya maupun usahanya.

Pada penutupan layanan, salah satu pengunjung, Sugeng (Lurah Murung Raya), bersama Lisnani, melakukan pendaftaran Perseroan Perorangan. Tim Kanwil Kemenkum Kalsel melayani proses hingga terbitnya Sertifikat dan Surat Pernyataan Pendirian secara langsung di lokasi. Sugeng menyampaikan apresiasi atas layanan yang cepat, tuntas, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Selain pelayanan hukum, suasana Bakul Fest turut semarak dengan Lomba Jukung dalam rangka Hari Jadi ke-499 Kota Banjarmasin. Penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba menjadi simbol pelestarian tradisi budaya lokal sekaligus memperkaya rangkaian acara.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan menegaskan komitmen dalam menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum sebagai fondasi pengembangan potensi ekonomi dan budaya daerah.





## Kanwil Kemenkum Kalsel Lanjutkan Layanan Hukum di Hari Kelima Bakul Fest 2025



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan kembali melanjutkan layanan hukum pada hari kelima pelaksanaan Bakul Fest 2025 yang digelar di Halaman Balai Kota Banjarmasin, Sabtu (6/9). Dalam kegiatan ini, tim membuka layanan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), serta konsultasi hukum langsung bagi masyarakat.

Antusiasme pengunjung terlihat dari hadirnya masyarakat yang berkonsultasi mengenai prosedur pendaftaran merek serta manfaat perlindungan hak cipta untuk produk kreatif. Tidak hanya itu, sejumlah pengunjung juga datang untuk mengambil sertifikat Kekayaan Intelektual yang telah selesai diterbitkan, menunjukkan keseriusan masyarakat dalam melindungi karya dan usaha mereka.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa partisipasi Kanwil dalam Bakul Fest merupakan bentuk nyata pelayanan hukum yang dekat dengan masyarakat.

“Kehadiran Kanwil Kemenkum Kalsel di Bakul Fest 2025 merupakan wujud komitmen kami untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa pelaku usaha, kreator, maupun masyarakat umum dapat dengan mudah mendapatkan informasi, mendaftarkan karyanya, dan memahami pentingnya perlindungan hukum bagi keberlanjutan usaha mereka,” ujarnya.

Suasana Bakul Fest 2025 semakin meriah dengan program doorprize dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Banjarmasin, di mana pengunjung bisa mendapatkan kupon undian berhadiah dengan berbelanja minimal Rp 25 ribu menggunakan metode pembayaran QRIS. Undian diumumkan setiap sepekan melalui Instagram resmi Disperdagin dan Bakul Fest 2025.

Partisipasi aktif Kanwil Kemenkum Kalsel ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum sebagai modal utama dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah.



## Kakanwil Kemenkum Kalsel Serahkan STR Posbankum, Perkuat Layanan Hukum Masyarakat Banjarmasin



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar kegiatan Serah Terima Surat Keputusan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Surat Tanda Register (STR) Posbankum pada seluruh kelurahan se-Kota Banjarmasin, Minggu (7/9) di Halaman Balai Kota Banjarmasin.

Kegiatan yang digagas langsung oleh Walikota Banjarmasin ini dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seluruh perangkat daerah Pemkot Banjarmasin mulai dari Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD, Camat, hingga Lurah se-Kota Banjarmasin. Turut hadir pula Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi P3H, Anton Edward Wardhana.

Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa kehadiran Posbankum bertujuan memenuhi rasa keadilan masyarakat melalui layanan bantuan hukum yang mudah dijangkau. Posbankum juga diharapkan menjadi wadah penyelesaian sengketa serta pendampingan hukum bagi warga. Alex memberikan apresiasi tinggi kepada Walikota Banjarmasin dan jajarannya yang berhasil mendorong seluruh kelurahan membentuk Posbankum, sehingga Banjarmasin menjadi kabupaten/kota pertama di Kalimantan Selatan yang mencapai 100% pembentukan Posbankum.

“Langkah ini adalah bukti nyata hadirnya negara dalam menjamin akses keadilan hingga ke tingkat kelurahan. Semoga Banjarmasin bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Kalimantan Selatan untuk mempercepat pembentukan Posbankum,” ungkap Alex.

Walikota Banjarmasin, M. Yamin, menegaskan bahwa Posbankum di tingkat kelurahan merupakan langkah strategis untuk memastikan masyarakat tidak lagi kesulitan dalam memperoleh pemahaman dan pendampingan hukum. Ia berharap sinergitas dan kolaborasi dengan Kanwil Kemenkum Kalsel dapat terus terjalin dalam memperkuat akses keadilan bagi seluruh warga.

Rangkaian kegiatan ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan Pembentukan Posbankum seluruh kelurahan (100%) oleh Walikota kepada Kakanwil, dilanjutkan dengan penyerahan Surat Tanda Register Posbankum oleh Kakanwil kepada Walikota. Selain itu, diberikan pula Sertifikat Juru Damai dengan gelar Non Litigation Peacemaker (NL.P) kepada para lurah serta Sertifikat Paralegal Kelurahan dengan gelar Certified Paralegal of Legal Aid (CPLA) sebagai bentuk pengakuan kompetensi dan peran mereka dalam mendukung layanan hukum di masyarakat.

Dengan momentum ini, Kota Banjarmasin tidak hanya mencatat sejarah sebagai pelopor di Kalimantan Selatan, tetapi juga memperkuat komitmennya untuk menghadirkan pelayanan hukum yang inklusif, berkeadilan, dan dekat dengan masyarakat.





## Banjarmasin Jadi Kota Pertama di Kalsel Rampungkan 100% Pembentukan Posbankum



Banjarmasin, Humas\_Info – Kota Banjarmasin mencatat sejarah baru sebagai kabupaten/kota pertama di Kalimantan Selatan yang berhasil merampungkan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh kelurahan. Pencapaian tersebut ditandai dengan kegiatan serah terima Surat Keputusan (SK) dan Surat Tanda Register (STR) Posbankum di Halaman Balai Kota Banjarmasin, Minggu (7/9).

Walikota Banjarmasin, M. Yamin, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembentukan Posbankum merupakan langkah strategis dalam memperkuat akses keadilan bagi masyarakat. Menurutnya, dengan hadirnya Posbankum di setiap kelurahan, warga tidak akan lagi kesulitan dalam memperoleh pemahaman maupun pendampingan hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota Banjarmasin beserta seluruh jajaran yang telah mendukung penuh program ini.

“Banjarmasin menjadi role model di Kalimantan Selatan. Semoga ini dapat ditiru kabupaten/kota lain agar masyarakat di seluruh daerah memiliki akses hukum yang sama. Dengan 100% Posbankum di Banjarmasin, kehadiran hukum benar-benar dirasakan di tengah masyarakat,” tegas Alex.

Kakanwil menambahkan bahwa program Posbankum sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya keadilan dapat diakses hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Posbankum diharapkan tidak hanya menjadi tempat konsultasi hukum, tetapi juga wadah mediasi konflik secara damai, advokasi perkara, serta rujukan kepada advokat bila diperlukan.

Kegiatan bersejarah ini turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD, Kepala Bagian, Camat, dan seluruh lurah se-Kota Banjarmasin. Kehadiran seluruh pemangku kepentingan menegaskan komitmen bersama dalam membangun masyarakat yang sadar hukum dan memiliki akses keadilan yang lebih merata.





## Lurah di Banjarmasin Terima Sertifikat NL.P dan CPLA sebagai Ujung Tombak Akses Keadilan



Banjarmasin, Humas\_Info – Momentum penyerahan SK dan STR Posbankum di Kota Banjarmasin juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat Non Litigation Peacemaker (NL.P) bagi lurah serta Certified Paralegal of Legal Aid (CPLA) bagi perangkat kelurahan. Penyerahan ini menandai langkah yang lebih komprehensif dalam memperkuat kapasitas aparatur kelurahan sebagai garda terdepan penyelesaian permasalahan hukum masyarakat.

Sebanyak sembilan lurah resmi menerima sertifikat NL.P, yakni Lurah Telaga Biru, Murung Raya, Belitung Utara, Banua Anyar, Mawar, Pekapuran Laut, Sungai Miai, Kuripan, dan Pemurus Dalam. Sementara itu, Lurah Sungai Baru menerima sertifikat CPLA sebagai perwakilan dari masyarakatnya yang menjadi penerima manfaat program ini.

Penyerahan sertifikat dilakukan langsung oleh Walikota Banjarmasin, M. Yamin, didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem. Kehadiran keduanya sekaligus menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah daerah dan Kementerian Hukum dalam membangun jejaring bantuan hukum di tingkat kelurahan.

Kakanwil Kemenkum Kalsel dalam sambutannya menyampaikan bahwa keberadaan NL.P dan CPLA menjadi bukti hadirnya negara dalam mendukung penyelesaian sengketa di tengah masyarakat.

“Dengan bekal sertifikat NL.P dan CPLA, para lurah dan paralegal dapat menjadi ujung tombak dalam membangun masyarakat yang sadar hukum. Kehadiran mereka penting untuk memastikan akses keadilan dapat dijangkau hingga ke tingkat kelurahan,” tegas Alex.

Sementara itu, Walikota Banjarmasin menambahkan apresiasi kepada lurah dan perangkat kelurahan yang siap berperan aktif menjalankan tugas sebagai juru damai dan paralegal. Menurutnya, keberadaan mereka akan sangat membantu pemerintah kota dalam mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum dan harmonis.

Pemberian sertifikat ini sekaligus mempertegas sinergi antara Kementerian Hukum dan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam memperkuat jaringan bantuan hukum, menjadikan Banjarmasin salah satu Kabupaten/Kota yang aktif dalam membangun ekosistem hukum yang inklusif di Kalimantan Selatan serta di lingkup nasional.





**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**



Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkalsel](https://www.kemenkumkalsel.go.id)



[@kemenkumkalsel](https://twitter.com/kemenkumkalsel)



[kalsel.kemenkum.go.id](https://kalsel.kemenkum.go.id)